

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Dwiyanto, *“Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi”*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Agus Sutiono dan Ambar TS, *“Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik Di Indonesia,”* dalam Ambar Teguh Sulistiyani (ed.), *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- C.S.T. Kansil, Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- F.C Strong dalam Rozalli Abdullah, *“Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isue Federalisme Sebagai Suatu Alternatif”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ferizaldi, *“Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia”*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Hanif Nurcholis, *“Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2007.
- HAW. Widjaja, *“Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Inu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan*, Renika Cipta, Jakarta, 1998.
- Irwan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Joko Widodo, *“Analisis Kebijakan Publik”*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007.

- Josef Riwu Kabo, *“Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia”*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- M. Manullang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Miftah Thoha, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *“Ilmu Negara”*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1995.
- Muh. Fauzan, *“Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah”*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Ni’ matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Nurmayani, *“Hukum Administrasi Daerah(Buku Ajaran)”*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Titik Triwulan Tutik, *“Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945”*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Paisol Burlian, *“Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang”*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2014.
- Prayudi, *“Hukum Administrasi Negara”*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Ridwan HR, *“Hukum Administrasi Negara”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Saiful Anwar, *“Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara”*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004.

Sedarmayanti, “*Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*”, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Siswanto Sunarno, “*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007.

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Victor M, Situmorang dan Jusuf Juhir, “*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Warsito Utomo, *Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Yeremias T. Keban, “*Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*”, Gava Media, Yogyakarta, 2004.

Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024.

Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat.

Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020.

Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat.

C. KARYA ILMIAH

Abdul Rauf Alaudin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, Volume 9, No. 4, Yogyakarta: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 2015.

Amalia Diamantina, *Pengawasan Pemerintah Daerah*, Jilid 39, No. 1, Semarang: Universitas Diponegoro Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2010.

AM. Mujahiddin, Good Governance suatu langkah mewujudkan peradilan yang bersih dan beribawa dalam sistem peradilan satu atap di indonesia, artikel yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan edisi No. 269 April 2008, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.

Fikriania Nurkhafiah Iswanto dan Yanti Rufaedah, *Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan SPIP Untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit*, Bandung: Politeknik Negeri Bandung, 2018.

Mhd, Ansori, *Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Volume 2, No. 2, Batanghari: Wajah Hukum, 2018.

Muhammad Andi Yhuniar, Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabubapten Semarang*, Volume 5, No. 4, Semarang: Diponegoro Law Journal, 2016.

Philipus M. Hadjon, *Sistem Pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*, Volume 14, No. 6, Surabaya: Yuridika, 1999.

Pontas R. Siahaan, *makalah Pengawasan Dalam Era Otonomi Daerah, dalam Diklat Manajerial Pengawasan di lingkungan Itjen Departemen Setingkat Inspektur (Esellon II)*, Jakarta, tanggal 21 s/d 24 Juni 2015.

Sjahrudin Rasul, *Pertanggung jawaban Kepala Daerah dan Upaya Pencegahan korupsi*, Jurnal Ilmiah Ranggading volume 8 Nomor 1, 2008.

Tri Widodo W. utomo, *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah dan Pemberdayaaan demos* (makalah tanpa tahun).

D. SUMBER LAIN

BPKP, "Warta Pengawasan (Transformasi Pengawasan Nasional)", Jakarta, 2013.

CH. Merry Indarwati, "*Optimalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Magelang Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*", dikutip pukul 21:07 tanggal 11 Februari 2021 dari <http://e-journal.uajy.ac.id/1246/>.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020.

Efriyeni Syaison, "*Analisis Efektivitas Pengawasan Fungsional Aparat Inspektorat Daerah Kota Solok*", dikutip pukul 22:15 tanggal 11 Februari 2021 dari <http://scholar.unand.ac.id/20657/>

<https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/menju-clean-goverment-dalam-negara-demokrasi/>, 2018, di akses: 15 Maret 2021, jam: 20.21 Wib.

<https://pemerintah.net/pembinaan-dan-pengawasan-pemerintahan-daerah/>, di akses pada 28 Juni 2021, Jam 19.15 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2019/10/19/14363841/polisi-tetapkan-asn-pemkot-padang-yang-terjaring-ott-sebagai-tersangka> di akses pada: 4 Februari 2021, jam: 19.10.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18869/5.%20Bab%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Pengertian%20Penguatan%20Kelembagaan%20adalah%20upaya,2014%2C%20p.%20180>), diakses pada : 22 Juli 2021, Jam 20.09 Wib.

<http://swamandiri.org/2008/01/23/pengawas-menuju-clean-government/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021, Jam : 14.30 Wib.

<https://www.hariansib.com/detail/Opini/Independensi-Inspektorat-Daerah-dalam-Pengawasan-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah>, Di akses pada 19 Juli 2021, Jam : 21.55 Wib.

Konvensi PBB Anti Korupsi, Pasal-2 Penggunaan Istilah-istilah.

Laporan Tahunan Inspektorat Daerah Kota Padang.

Media Indonesia.com, di akses pada : tanggal 24 April 2021, Jam 21.19 Wib.

Paparan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dalam Modul Diklat Pengawasan Nasional Tahun 2012.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2020 Inspektorat Kota Padang.

